



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT  
PANJA PERFILMAN NASIONAL KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA, RISTEKDIKTI, BADAN EKONOMI KREATIF DAN  
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2015 – 2016.
Masa Persidangan ke-	: III (tiga).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: <b>Dengar Pendapat Umum (RDPU).</b>
Dengan	: <b>Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI)</b>
Hari/Tanggal	: <b>Senin, 15 Pebruari 2016.</b>
Pukul	: 10.00 WIB. – selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: <b>DR.Abdul Kharis Almasyhari/ Ketua Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI.</b>
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.Sos/Kabagset Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Masukan terkait Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman; 2. Lain-lain.
Hadir	: 19 orang dari 31 Anggota Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI.
Hadir dari APROFI	: Sheila Timothy/Ketua Umum APROFI beserta jajarannya.

### **I. PENDAHULUAN.**

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 15.20 WIB oleh DR. Abdul Kharis Almasyhari/Ketua Panja Perfilman Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum sesuai pasal 246 ayat (1) peraturan tata tertib DPR RI.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI) serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI.

### **II. CATATAN RAPAT.**

1. Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan Asosiasi Produser Film Indonesia (APORFI) terhadap:
  - (i) struktur organisasi APROFI 2013-2016;
  - (ii) mata rantai industri film;
  - (iii) kondisi umum industri film di Indonesia;
  - (iv) eksibisi film Indonesia;
  - (v) distribusi film Indonesia; dan
  - (vi) produksi film Indonesia.

2. Terkait dengan permasalahan perfilman nasional, APROFI memberikan analisa komparatif industri film di Asia, bahwa perkembangan industri perfilman Asia pada 5 s.d 7 tahun terakhir terjadi di Cina, India, dan Vietnam. Vietnam membuka pasarnya kepada investasi asing 5 tahun yang lalu, dan industri perfilman Cina sudah tumbuh sejak 10 tahun yang lalu ketika membuka pasar kepada investasi asing.
3. Terkait dengan UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, APROFI memberikan saran sbb:
  - a. Penguatan tentang larangan integrasi vertikal (Pasal 11);
  - b. Penguatan pelaksanaan Sistem Box Office terintegrasi (Pasal 29);
  - c. Penerapan bersyarat persentase jam tayang untuk film lokal (Pasal 32);
  - d. Penguatan Badan Perfilman Indonesia (Pasal 68)
  - e. Klasifikasi film dalam LSF;
  - f. Penguatan peran Pemerintah dalam pendidikan film; dan
  - g. Mempertegas pembagian tugas dan fungsi antara Kemendikbud dan Bekraf.
4. Terkait dengan pembukaan DNI film, APROFI mendukung kebijakan tersebut dengan alasan bahwa pembukaan DNI film akan meningkatkan kapasitas pasar dan kebutuhan terhadap film lokal, bukan hanya kemudahan permodalan tetapi juga penciptaan pasar baru. Dengan melalui ko-produksi akan ada transfer ilmu dan transfer teknologi sehingga menciptakan tenaga kerja kreatif yang handal yang pada akhirnya akan semakin banyak film Indonesia berkualitas dan film budaya yang dapat diproduksi.
5. Terkait dukungan APROFI terhadap pembukaan DNI film, Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI meminta APROFI untuk menyampaikan kajian yang komprehensif secara tertulis dengan disertai data yang valid seperti misalnya daya saing film nasional/budaya, strategi bisnis, kesiapan sumber daya para pemangku kepentingan perfilman nasional, dampak edukasi/ karakter untuk generasi mendatang, dan lainnya.
6. Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI mendorong APROFI untuk terus meningkatkan produksi film baik dari sisi kuantitas maupun kualitas agar film nasional tidak hanya menjadi tuan rumah di negeri sendiri tetapi juga dapat menjadi tamu di negara lain.

### III. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul 18.00 WIB.

**KETUA RAPAT,**



**DR. ABDUL KHARIS ALMASYHARI**